



Implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia dan agensi Dadah Kebangsaan Malaysia

ASUMTA, Zahrul Azhar, dr. Mubasysir Hasanbasri, MA

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

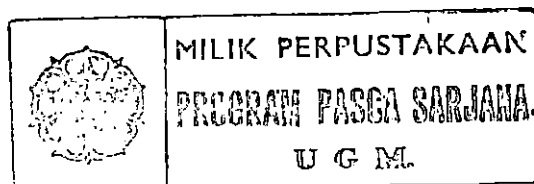
Latar belakang : Penyalahgunaan Narkoba telah menjadi masalah besar, kompleks dan sukar penanganannya, hampir seluruh negara termasuk juga Indonesia dan Malaysia mengalami permasalahan narkoba ini, di Indonesia kasus narkoba mengalami peningkatan bahkan hingga 89.74% pada tahun 1999-2000. di Malaysia tidak kalah menghawatirkan, tahun 2000 pada 5 bulan pertama saja sudah terdapat 10.591 penyalahguna narkoba yang tercatat oleh pemerintah Malaysia. Kerjasama antar organisasi baik pemerintah dan non pemerintah merupakan salah satu hal yang penting dalam meminimalisir penyalahguna narkoba.

Metode : Rancangan penelitian ini merupakan studi kasus dari dua lembaga pelaksana kebijakan tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang telah ada serta untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan dalam efektifitas pencapaian tujuan lembaga/ organisasi.

Hasil : BNN merupakan lembaga langsung dibawah presiden yang menangani masalah narkoba di Indonesia salah satu kebijakannya adalah koordinasi dan kerjasama internasional dan ADK yang didirikan tahun 1996 adalah lembaga dibawah kementerian dalam negeri Malaysia. Penerapan hukum yang diterapkan di Malaysia telah menghukum gantung 209 pelaku. ADK telah memasukkan masalah dadah dalam kurikulum sekolah-sekolah di seluruh Negeri bagian Malaysia.

Kesimpulan : Implementasi kebijakan narkoba di indonesia oleh BNN belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan satgas-satgas yang diperlukan sebagaimana belum terbentuk. BNN telah melakukan Kerjasama dengan LSM namun hanya jika dianggap perlu oleh BNN. Implementasi kebijakan Narkoba di Malaysia dilakukan oleh ADK dengan bekerjasama dengan departemen-departemen terkait. Malaysia telah mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga internasional atas hasil kerjanya dalam bidang represif bagi penyalahguna narkoba.

Kata kunci : Kebijakan, Implementasi, Kerjasama, Narkoba



Background: Drug abuses have become a big, complex and difficult problem to solve that was faced by almost all country in the world include Indonesia and Malaysia. A number of drug abuse cases in Indonesia in 1999-2000 increased to 89,74%. In Malaysia there was also a serious situation, because in the year of 2000 only the early five years it was noted 10.591 drug abuse cases. Inter organizational relation among governmental and non-governmental organization is one important thing as an effort to minimize drug abuse.

Method: This research is a case study research that compares two agencies that carry out drug abuse tackling policy which have occur and also observe the inter organizational relation that have been done to grasp organizational aims.

Result: BNN is agency that is under President control, which defeat drug abuse cases in Indonesia that has important policy such as international coordination and relation. ADK that was established in 1996 is an agency under Ministry of National Affair. The completions of low in Malaysia have punished 206 criminals. ADK also have put drug abuse cases in school curriculum in all over Malaysia.

Conclusion: Implementations of drug abuse policy in Indonesia, which have been done by BNN, haven't done well, because the important units, which are needed, haven't create. BNN will form a relation with NGO on the particular situation. In Malaysia drug abuse policy have been implemented by ADK that form a relationship with concerning Ministry. Malaysia has gotten an award from many international agencies for their achievement in drug abuse repressive action.

Key Word: Policy, implementation, relationship and drug abuse